

14. RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BLITAR TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Rencana Kerja) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah, seperti dinas atau badan, sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran. Renja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar Tahun 2025– 2029 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Blitar.

Bahwa sesuai Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam penyusunannya, Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar tahun 2026 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2026, Renstra Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029, dokumen perencanaan lingkup nasional dan regional, serta tindak lanjut dalam proses penyusunan KUPPAS dan RAPBD Tahun 2026. Penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 ini juga didasarkan pada hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan periode sebelumnya serta mempertimbangkan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

Diharapkan dengan penyusunan Rencana Kerja ini akan tersusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Rencana Kerja juga dimaksudkan sebagai parameter dalam memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar sekaligus sebagai instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
24. Peraturan BPS No. 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
27. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber;
28. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
29. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
33. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 5);
38. Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112
39. Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 Tahun 2021 tentang LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar
40. Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik;

41. Peraturan Walikota Blitar Nomor 88 tahun 2022 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
42. Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan atas Perwali Nomor 49 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
43. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
44. Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
45. Peraturan Walikota Blitar Nomor 9 tahun 2024 tentang Satu Data Kota Blitar.
46. Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik;
47. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2026 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2026 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2026.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2026 adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2026 dan pedoman pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah. Serta sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2026

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN, menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika;
- BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK TAHUN LALU, berisikan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun lalu dan capaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik, Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik, serta penelaahan Usulan Program, Kegiatan, dan sub kegiatan Masyarakat.
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK menguraikan telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik;
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV menguraikan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.
- BAB V PENUTUP, berisikan catatan penting dengan menguraikan kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik tahun 2026.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik dapat diketahui dari pengukuran kinerja dan pengukuran keuangan pada tahun sebelumnya. Pengukuran laporan kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- Indikator Masukan (*Input*), untuk mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- Indikator Keluaran (*output*), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- Indikator Hasil (*outcome*), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Blitar tahun lalu (tahun 2024) dan prakiraan capaian tahun berjalan (tahun 2025) dengan mengacu pada APBD tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar dan Pencapaian Renstra Dinas Komuninkasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar s/d Tahun 2025 Kota Blitar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2024						Target Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025			
											Target Renja PD tahun 2024		Realisasi Renja PD 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
2					Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar																
2	16				Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika																
					Tujuan : Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,4 5	indeks	2,8 1	indeks	3,9	indeks	4,1 1	indeks	105,3	persen	4,2 5	indeks	4,1 1	indeks	119%
					Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88, 75	angka	85, 23	angka	86, 25	angka	86, 43	angka	100,2	angka	87, 5	angka	86, 43	angka	97%
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84	angka	85, 64	angka	84	angka	88, 94	angka	105,88 095	persen	89	angka	88	angka	105%
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	persen	100	persen	100	persen	98, 55	persen	98,55	persen	100	persen	100	persen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2024						Target Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		
											Target Renja PD tahun 2024		Realisasi Renja PD 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2	1	0	2.0	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44	Dokum en	13	Dokum en	11	Dokum en	11	Dokum en	100	pers en	11	Doku men	35	Dokum en	80%
2	1	0	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28	laporan	7	laporan	7	laporan	8	laporan	114,28 571	pers en	7	lapora n	22	laporan	79%
2	1	0	2.0	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	laporan	2	laporan	1	laporan	1	laporan	100	pers en	1	lapora n	4	laporan	40%
2	1	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	persen	100	persen	100	persen	90	persen	90	pers en	100	persen	100	persen	100%
2	1	0	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54	Orang	13	Orang	31	Orang	33	Orang	106,45 161	pers en	33	Orang	79	Orang	146%
2	1	0	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	4	Lapora n	4	Lapora n	4	Lapora n	3	Lapora n	75	pers en	4	Lapora n	11	Lapora n	275%

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2024						Target Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025					
									Target Renja PD tahun 2024		Realisasi Renja PD 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
2	1	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standart	100	persen	100	persen	100	persen	98	persen	98	persen	100	persen	100	persen	100%
2	1	0	2.0	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	249	Paket	68	Paket	65	Paket	62	Paket	95,384 615	persen	33	Paket	163	Paket	65%
2	1	0	2.0	00	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	350	Orang	50	Orang	100	Orang	73	Orang	73	persen	65	Orang	188	Orang	54%
2	1	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	persen	100	persen	100	persen	50	persen	50	persen	100	persen	100	persen	100%
2	1	0	2.0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	Paket	4	Paket	4	Paket	2	Paket	50	persen	4	Paket	10	Paket	63%
2	1	0	2.0	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	3	Paket	3	Paket	2	Paket	66,67	persen	3	Paket	8	Paket	67%
2	1	0	2.0	00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	Paket	5	Paket	5	Paket	4	Paket	80	persen	5	Paket	14	Paket	70%
2	1	0	2.0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	114 0	Paket	36	Paket	36	Paket	29	Paket	80,56	persen	28	Paket	93	Paket	8%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2024						Target Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025			
											Target Renja PD tahun 2024		Realisasi Renja PD 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2	1	0	2.0	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00	persen	1	Paket	3	Paket	75%
2	1	0	2.0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	96	Dokumen	24	Dokumen	24	Dokumen	16	Dokumen	66,67	persen	24	Dokumen	64	Dokumen	67%
2	1	0	2.0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145	Laporan	36	Laporan	36	Laporan	57	Laporan	158,33	persen	36	Laporan	129	Laporan	89%
2	1	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100	persen	0	persen	0	persen	0	persen	0	persen	100	persen	100	persen	100%
2	1	0	2.0	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	persen	6	Unit	6	Unit	67%
2	1	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100%
2	1	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	Laporan	36	Laporan	36	Laporan	27	Laporan	75	persen	36	Laporan	99	Laporan	69%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2024						Target Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		
											Target Renja PD tahun 2024		Realisasi Renja PD 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2	1	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52	Laporan	13	Laporan	13	Laporan	9	Laporan	69,23	persen	13	Laporan	35	Laporan	67%
2	1	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	100	persen	100	persen	100	persen	50	persen	50	persen	100	persen	250	persen	250%
2	1	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32	Unit	8	Unit	8	Unit	5	Unit	62,5	persen	8	Unit	21	Unit	66%
2	1	0	2.0	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34	Unit	6	Unit	9	Unit	6	Unit	66,67	persen	10	Unit	22	Unit	65%
2	1	0	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100	persen	2	Unit	4	Unit	100%
					Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	1. Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik	100	angka	86	angka	91	angka	97,86	angka	107,54	persen	98	angka	97,86	angka	98%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2024						Target Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		
											Target Renja PD tahun 2024		Realisasi Renja PD 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2.Persentase Tindak lanjut Penanganan Pengaduan	100	persen	0	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100%
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang Ditetapkan Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	100 100	persen	85 70	persen	90 80	persen	90 80	persen	100 100	persen	90 95	persen	90 95	persen	90% 80%
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	89	persen	45, 8	persen	57	persen	57	persen	100	persen	68, 5	persen	57	persen	64%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2024						Target Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		
											Target Renja PD tahun 2024		Realisasi Renja PD 2024		Tingkat Realisasi (%)						
2	1	0	2.0	00	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	8	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	persen	0	Dokumen	3	Dokumen	38%
2	1	0	2.0	00	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100	persen	0		8	Dokumen	67%
2	1	0	2.0	00	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	48	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100	persen	0		24	Dokumen	50%
2	1	0	2.0	00	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2080	Dokumen	510	Dokumen	520	Dokumen	831	Dokumen	159,8	persen	0		1341	Dokumen	64%
2	1	0	2.0	00	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	34	Dokumen	11	Dokumen	11	Dokumen	11	Dokumen	100	persen	6	Media	28	Media	82%
2	1	0	2.0	00	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	28	Dokumen	5	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100	persen	700	pemohon	717	pemohon	102%
2	1	0	2.0	00	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	5650	Layanan	1.000	Layanan	1100	Layanan	610	Layanan	55,45	persen	0	Layanan	1610	Layanan	28%

[illegible]

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2024						Target Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		
											Target Renja PD tahun 2024		Realisasi Renja PD 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Daerah Kabupaten/Kota																
2	1 6	0 3	2.0 1	00 01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	24	Domain	6	Domain	6	Domain	6	Domain	100	pers en	4	Domai n	16	Domain	67%
2	1 6	0 3	2.0 1	00 02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7	Dokum en	1	Dokum en	2	Dokum en	2	Dokum en	100	pers en	0		3	Dokum en	43%
2	1 6	0 3	2.0 1	00 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	63	Unit	3	Unit	20	Unit	24	Unit	120	pers en	30	PD	57	Unit	90%
2	1 6	0 3	2.0 2		Pengelolaan E- Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Presentase ketersediaan aplikasi pemerintahan dan layanan publik	100	persen	93	persen	96	persen	96	persen	100	pers en	98	persen	96	persen	96%
2	1 6	0 3	2.0 2	00 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E- Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4	Dokum en	1	Dokum en	1	Dokum en	1	Dokum en	100	pers en	0		2	Dokum en	50%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2024						Target Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		
											Target Renja PD tahun 2024		Realisasi Renja PD 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2	1	0	2.0	00	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	persen	0		2	Dokumen	50%
2	1	0	2.0	00	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	4	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100	persen	0		2	Unit	50%
2	1	0	2.0	00	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	persen	0		2	Dokumen	50%
2	1	0	2.0	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	11	Dokumen	1	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100	persen	0		4	Dokumen	36%
2	1	0	2.0	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	8	perangkat daerah	1	perangkat daerah	1	perangkat daerah	1	perangkat daerah	100	persen	0		2	perangkat daerah	25%
2	1	0	2.0	00	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	8	Unit	2	Unit	2	Unit	2	Unit	100	persen	0		4	Unit	50%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2024						Target Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		
											Target Renja PD tahun 2024		Realisasi Renja PD 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2	1	0	2.0	00	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	7	Layanan	1	Layanan	2	Layanan	2	Layanan	100	persen	0		3	Layanan	43%
2	1	0	2.0	00	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	7	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	persen	0		3	Dokumen	43%
2	1	0	2.0	00	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	4	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	persen	0		4	Dokumen	100%
2	1	0	2.0	00	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	persen	0		2	Dokumen	50%
					Meningkatnya Penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100%
						Indeks Pembangunan Statistik	3,1	indeks	0	indeks	2,7	indeks	2,6 5	indeks	98,15	persen	2,9	indeks	2,6 5	indeks	85%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2024						Target Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		
											Target Renja PD tahun 2024		Realisasi Renja PD 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	2	0			PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik	100	persen	100	persen	96, 71	persen	96, 71	persen	100	persen	98, 31	persen	96, 71	persen	97%
2	2	0	2.0		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	persen	100	Persen	100	Persen	100%
2	2	0	2.0	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	14	Dokumen	6	Dokumen	3	Dokumen	2	Dokumen	66,67	persen	0		8	Dokumen	57%
2	2	0	2.0	00	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	40	Orang	30	Orang	10	Orang	21	Orang	210	persen	0		51	Orang	128%
2	2	0	2.0	00	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	72	Dokumen	12	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100	persen	0		16	Dokumen	22%
2	2	0	2.0	00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	20	orang	8	orang	4	orang	5	orang	125	persen	0		13	orang	65%
2	2	0	2.0	00	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	4	unit	1	unit	1	unit	1	unit	100	persen	0		2	unit	50%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2024						Target Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		
											Target Renja PD tahun 2024		Realisasi Renja PD 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2	2	0	2.0	00	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	70	dokumen	28	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00	persen	1	dokumen	30	dokumen	43%
					Meningkatnya keamanan informasi Pemerintah Daerah	Indeks KAMI	69, 77	persen	46, 51	persen	54, 26	persen	59, 95	persen	110,49	persen	62, 02	persen	599 5	persen	8593%
2	2	0			PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	69, 77	persen	46, 8	persen	64, 26	persen	56	persen	87,15	persen	62, 02	persen	56	persen	80%
2	2	0	2.0		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepatuhan OPD terhadap penerapan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab/kota	60, 77	Persen	47, 8	Persen	54, 26	Persen	80, 2	Persen	147,81	persen	62, 02	Persen	80, 2	persen	132%
2	2	0	2.0	00	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	4	Dokumen	8	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	50	persen	1	Dokumen	10	Dokumen	250%
2	2	0	2.0	00	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18	Laporan	6	Laporan	4	Laporan	3	Laporan	75	persen	4	Laporan	13	Laporan	72%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2024						Target Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		
											Target Renja PD tahun 2024		Realisasi Renja PD 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																
2	2	0	2.0	00	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	9	Laporan	3	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	50	persen	2	Laporan	6	Laporan	67%
2	2	0	2.0	00	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	82	Perangkat Daerah	35	Perangkat Daerah	20	Perangkat Daerah	12	Perangkat Daerah	60	persen	21	Perangkat Daerah	68	Perangkat Daerah	83%
2	2	0	2.0		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang menerapkan pola hubungan komunikasi sandi	100	persen	35, 2	persen	50	persen	86	persen	172	persen	75	persen	86	persen	86%
2	2	0	2.0	00	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	140	Perangkat Daerah	35	Perangkat Daerah	30	Perangkat Daerah	30	Perangkat Daerah	100,00	persen	30	Perangkat Daerah	95	Perangkat Daerah	68%

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Renja Diskominfo Tahun 2025 Kota Blitar, maka diperoleh pencapaian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada.

b. Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

c. Faktor-faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya kinerja program/kegiatan

Adanya kerja sama dan koordinasi yang baik dari beberapa unsur diantaranya: Pimpinan, Mitra kerja, ASN. Pelaksanaan kegiatan maupun pengadaan barang/jasa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra Perangkat Daerah

Dari 7 kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota semua mencapai target. Hal ini terlihat pada tabel 2.1 bahwa indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah mencapai 100%.

e. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan dan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, ke depan dilakukan evaluasi perencanaan target kinerja kegiatan, dengan merencanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Diskominfo.

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

a. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada

b. Realisasi sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

c. Faktor-faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya kinerja program/kegiatan

Adanya kerja sama dan koordinasi yang baik dari beberapa unsur diantaranya: Pimpinan, Mitra kerja, ASN. Kemampuan dan keahlian pegawai, motivasi kerja, serta kepemimpinan dalam organisasi. Adanya Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Strategi Komunikasi

d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra Perangkat Daerah

Dari 1 kegiatan pada Program Informasi dan Komunikasi Publik semua mencapai target. Hal ini terlihat pada tabel 2.1 bahwa indikator kinerja Program Informasi dan Komunikasi Publik telah mencapai 100%.

e. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut :

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan dan program Program Informasi dan Komunikasi Publik, ke depan dilakukan perbaikan perencanaan target kinerja kegiatan, dengan merencanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Diskominfo.

3. Program Aplikasi Informatika

a. Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

- Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota

b. Faktor-faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya kinerja program/kegiatan

Adanya kerja sama dan koordinasi yang baik dari beberapa unsur diantaranya: Pimpinan, Mitra kerja, ASN. Kemampuan dan keahlian pegawai, motivasi kerja, serta kepemimpinan dalam organisasi Pembuatan aplikasi sistem informasi layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan pada rencana induk pengembangan SPBE Pemerintah Kota Blitar.

c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra Perangkat Daerah

Dari 2 kegiatan pada Program Aplikasi Informatika semua mencapai target. Hal ini terlihat pada tabel 2.1 bahwa indikator kinerja Program Aplikasi Informatika telah mencapai 100%.

d. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab dimaksud

Guna meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan dan Program Aplikasi Informatika, ke depan dilakukan perbaikan pelaksanaan review masterplan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan merencanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Diskominfo.

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

a. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

b. Faktor-faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya kinerja program/kegiatan

Adanya kerja sama dan koordinasi yang baik dari beberapa unsur diantaranya: Pimpinan, Mitra kerja, ASN. Data statistik sektoral dapat dikumpulkan sesuai target rencana kinerja tahunan sebagai bank data Kota Blitar . Meningkatnya koordinasi pro aktif dengan Perangkat Daerah terkait di Perangkat Daerah yang belum mengumpulkan data statistik sektoral secara optimal.

c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra Perangkat Daerah

Dari 1 kegiatan pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral semua mencapai target. Hal ini terlihat pada tabel 2.1 bahwa indikator kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral telah mencapai 100%.

d. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab dimaksud .

Guna meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan dan program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Persentase OPD yang menggunakan data statistik melalui e-walidasi pd dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan di Kota Blitar harus tetap dijaga dan terus ditingkatkan kinerjanya dengan program-program yang lebih baik dan lebih tepat sasaran.

Harapannya dengan kinerja yang lebih baik dan program-program yang lebih tepat sasaran, Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan di Kota Blitar dapat naik lebih signifikan dan dapat mencapai target RPJMD tahun 2025-2029. Beberapa program atau kebijakan yang

dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Blitar adalah dengan sinkronisasi dan koordinasi dengan aplikasi SIPD terkait penyusunan perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan di Kota Blitar

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

a. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :

- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

c. Faktor-faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya kinerja program/kegiatan adalah:

Adanya kerja sama dan koordinasi yang baik dari beberapa unsur diantaranya: Pimpinan, Mitra kerja, ASN. Penyelenggaraan bimbingan teknis penilaian mandiri keamanan informasi perangkat daerah menggunakan indeks KAMI.

d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra Perangkat Daerah

Dari 2 kegiatan pada Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi semua mencapai target. Hal ini terlihat pada tabel 2.1 bahwa indikator kinerja Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi telah mencapai 100%.

e. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab dimaksud,

Guna meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan dan program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, ke depan dilakukan beberapa kegiatan atau kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Blitar adalah dengan melakukan bimbingan teknis, desk atau pendampingan terkait peningkatan nilai capaian Indeks Kami dan melakukan urutan skala prioritas Perangkat Daerah dan pelayanan publik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui : penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome). Indikator -indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar menangani urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar, yaitu urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Terkait hal tersebut Dinas Kominfotik berkewajiban memenuhi target capaian kinerja yang telah ditetapkan sebagai IKU Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Gambaran kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam pencapaian target pelayanan PD tahun 2024, 2025, proyeksi tahun 2026 dan 2027 sesuai dengan Renstra Tahun 2025-2029 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar (sesuai Renstra 2021 – 2026)

NO	Indikator	IKU/IKK/SPM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
I	INDIKATOR TUJUAN												
	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik		2,31	2,82	3,90	4,25	2,81	3,68	4,11	4,11*			Menunjukkan peningkatan signifikan atas tata kelola pemerintahan berbasis digital dan efektivitas transformasi digital.
II	INDIKATOR SASARAN												
A.	Urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												
	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	(IKU)	89	94	98	100	90	94	98	98*	28.12	34.37	koordinasi lintas perangkat daerah dalam membangun integrasi sistem digital sudah berjalan efektif
	Nilai Hasil Monev PPID	(IKU)	81	86	91	98	76	88,69	97,86	97,86*	98	98	keterbukaan informasi publik meningkat dan pengelolaan PPID semakin baik.
	Presentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat				100	100			100	100*	-	-	penanganan pengaduan telah optimal.
	Presentase PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas kominfo	(IKK)	100	100	100	100	100	100	100	100*	-	-	30 PD telah terhubung dengan akses internet
	Presentase layanan publik diselenggarakan	(IKK)	89	94	98	100	90	89,3	97.67	97.67*	-	-	koordinasi lintas perangkat daerah dalam

NO	Indikator	IKU/IKK/SPM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
	secara online dan terintegrasi												membangun integrasi sistem digital sudah berjalan efektif
	Presentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kota Blitar	(IKK)	34	45,5	57	68,5	87	45,8	86,25	86,25*	-	-	efektivitas penyebaran informasi publik dan keberhasilan kampanye komunikasi.
B.	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik												
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	(IKU)	96	97	100	100	100	100	100	100	-	-	tingkat kesadaran dan pemanfaatan data sangat tinggi di seluruh OPD.
	Indeks Pembangunan Statistik				2,7	2,9			2,65	2,65	2.75	2.75	IPS pada tahun 2024 tidak tercapai namun realisasi tiap tahunnya meningkat
	Presentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	(IKK)	100	100	100	100	100	100	100	100			tingkat kesadaran dan pemanfaatan data sangat tinggi di seluruh OPD.
	Presentase PD yang menggunakan data statistik dalam	(IKK)	100	100	100	100	100	100	100	100			tingkat kesadaran dan pemanfaatan data sangat tinggi di seluruh OPD.

NO	Indikator	IKU/IKK/SPM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
	melakukan evaluasi pembangunan daerah												
C.	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian												
	Indeks KAMI	(IKU)	38,76	46,51	54,26	62,02	39,4	46,8	59,95	59,95	42.27	51.85	Kinerja penguatan Indeks KAMI cukup signifikan
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	(IKK)	38,76	46,51	54,26	62,02	39,4	67,4	60,23	60,23	42.27	51.85	Tahun 2022-2025 formulasi perhitungannya versi 4.0 berbeda versi dengan tahun 2026-2027 versi 5.0

* PROYEKSI REALISASI TAHUN 2026

Berdasarkan table 2.2 dapat diketahui bahwa :

1. Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Blitar tahun 2024 sebesar 4,11 dari target 3,90 dengan tingkat capaian 105,3%. Nilai ini terbentuk dari penilaian empat domain utama, yaitu Domain 1 kebijakan internal tata kelola SPBE (bobot 13%; 10 indikator), Domain 2 tata kelola SPBE yang mencakup perencanaan strategis (10%; 4 indikator), teknologi informasi dan komunikasi (10%; 4 indikator), serta penyelenggaraan SPBE (5%; 2 indikator), Domain 3 manajemen SPBE yang meliputi penerapan manajemen SPBE (12%; 8 indikator) dan audit TIK (4,5%; 3 indikator), serta Domain 4 layanan SPBE yang terdiri atas layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik (27,5%; 10 indikator) dan layanan publik berbasis elektronik (18%; 6 indikator). Data pembentuk ini menunjukkan bahwa aspek layanan SPBE memberikan kontribusi terbesar terhadap nilai akhir. Capaian yang melampaui target Renstra ini menegaskan bahwa implementasi SPBE di Kota Blitar telah berjalan sangat baik, namun untuk menjaga konsistensi capaian ke depan diperlukan tindak lanjut berupa optimalisasi peran Tim Koordinasi SPBE, peningkatan kapasitas anggota tim dalam regulasi dan literasi digital, serta pelibatan akademisi dan praktisi dalam perumusan kebijakan maupun implementasi SPBE pada aspek yang masih belum tersedia.
2. Indikator Kinerja Utama Persentase layanan publik online dan terintegritasi merupakan periode pertama penghitungan di awal Renstra tahun 2021-2026. Dengan Target di Tahun 2024 sebesar 98% dan terealisasi sebesar 98 % dengan persentase sebesar 100%, kriteria sangat baik. Capaian ini diperoleh melalui kesiapan perangkat daerah dalam mengampu aplikasi dan mengintegrasikan layanannya, yang pada tahun 2024 ditunjukkan dengan pengintegrasian dua layanan sektor pertanian, peternakan, perkebunan serta perikanan dan kelautan melalui aplikasi SIPETANI, sehingga kinerja layanan publik online dan terintegrasi meningkat 4% dibandingkan tahun 2023. Namun, pencapaian tersebut masih menghadapi kendala, terutama karena dari 43 jenis layanan yang harus dipenuhi sebagian besar masih bergantung pada perangkat daerah, sehingga standar data dan sistem belum seragam, interoperabilitas sulit dicapai, serta standar keamanan belum optimal. Untuk meminimalkan hambatan tersebut, diperlukan efektivitas peta rencana SPBE sebagai panduan strategis implementasi digitalisasi pemerintahan yang selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah, sekaligus menjamin keamanan data, mengharmonisasikan sistem, dan menyediakan panduan teknis pengembangan aplikasi. Selain itu, tindak lanjut juga perlu dilakukan melalui pembentukan tim asistensi yang menetapkan target layanan secara lebih terukur agar integrasi dapat berjalan optimal.
3. Indikator Kinerja Utama Nilai hasil PPID dengan target 91 % pada tahun ini terealisasi 97,86 % persentase sebesar 107 % baik. Nilai capaian ini terbentuk berdasarkan hasil penilaian Monev Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Jawa Timur 2024, yang mencakup beberapa komponen utama, antara lain ketersediaan data dukung SAQ dari perangkat daerah, tingkat sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah, dukungan pimpinan, serta efektivitas sistem kerja dalam pemenuhan SAQ. Pencapaian tersebut didukung oleh ketersediaan data dukung yang memadai, kolaborasi antar perangkat daerah yang baik, dukungan aktif pimpinan, dan perbaikan sistem kerja dalam pemenuhan SAQ. Namun, masih terdapat hambatan, seperti keraguan perangkat daerah dalam memberikan data pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, padatnya agenda pimpinan baik nasional maupun regional yang bersamaan dengan pelaksanaan wawancara Keterbukaan Informasi Publik, serta alokasi anggaran yang belum maksimal untuk meningkatkan keterbukaan

informasi publik. Untuk mengatasi hambatan tersebut, tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain optimalisasi dukungan perangkat daerah dalam penyediaan data pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, penguatan peran pimpinan dalam proses Monev Keterbukaan Informasi Publik, serta himbauan kepada perangkat daerah untuk mengalokasikan anggaran secara memadai bagi peningkatan keterbukaan informasi publik.

4. Indikator Kinerja Kunci Presentase PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas kominfo dengan target 100 % dan terealisasi 100 % dengan kriteria sangat baik , hal ini menunjukkan bahwa internet di seluruh Perangkat Daerah sudah dapat diakses guna mendukung giat atau operasional pada bidang IT. Keberhasilan ini ditentukan oleh factor pendukung yaitu adanya koordinasi dan komitmen dari seluruh Perangkat Daerah
5. Indikator Kinerja Kunci Presentase layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan target 98 % dan terealisasi 98 % dengan kriteria sangat baik , hal ini menunjukkan bahwa internet di seluruh Perangkat Daerah sudah dapat diakses guna mendukung giat atau operasional pada bidang IT. Keberhasilan ini ditentukan oleh factor pendukung yaitu pembuatan aplikasi sistem informasi layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan pada rencana induk pengembangan SPBE Pemerintah Kota Blitar.
6. Indikator Kinerja Kunci Presentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kota Blitar dengan target 57% dan terealisasi 86.25 % dengan kriteria sangat baik. Keberhasilan ini ditentukan oleh factor pendukung yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi khususnya media social sehingga diseminasi informasi kepada Masyarakat mudah terserap.
7. Indikator Kinerja Utama Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan dengan target 100 % pada tahun ini terealisasi 100 % persentase sebesar 100 %. Dikarenakan Data Statistik Sektoral sudah terkumpul sesuai target rencana kinerja tahunan sebagai Bank Data Kota Blitar.
8. Indikator Kinerja Kunci Presentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan target 100% dan terealisasi 100 % dengan kriteria sangat baik. Menunjukkan bahwa seluruh OPD telah menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan ini ditentukan oleh factor pendukung yaitu tingkat kesadaran dan pemanfaatan data sangat tinggi di seluruh OPD.
9. Indikator Kinerja Kunci Presentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan target 100% dan terealisasi 100 % dengan kriteria sangat baik. Menunjukkan bahwa seluruh OPD telah menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan ini ditentukan oleh factor pendukung yaitu Adanya sarana prasarana yang memadai dalam mempublikasikan data statistik sektoral
10. Capaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) pada tahun 2024 adalah sebesar 2,65 dari target 2,70, atau tingkat capaian 98% berdasarkan penilaian BPS dengan kriteria “baik.” sedangkan dibandingkan target akhir periode Renstra sebesar 85% dengan kategori tinggi, secara umum capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan statistik di Kota Blitar sudah berjalan sesuai arah yang ditetapkan. Adapun penghambat utama yang dihadapi adalah belum terbangunnya data spasial

Pemerintah Kota Blitar, sehingga integrasi dan pemanfaatan data belum sepenuhnya optimal. Komponen IPS yang perlu ditingkatkan adalah, diperlukan pembangunan portal data spasial Pemerintah Kota Blitar untuk memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan mendukung pencapaian target Renstra secara lebih efektif di tahun berikutnya.

11. Indikator Kinerja Utama Indeks KAMI dengan target 54.26% dan terealisasi 59.95% dengan kriteria sangat baik.
12. Indikator Kinerja Kunci Tingkat keamanan informasi pemerintah dengan target 54.26% dan terealisasi 60.23% dengan kriteria sangat baik. Keberhasilan ini ditentukan oleh factor pendukung yaitu Adanya Kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur tentang penilaian mandiri keamanan informasi menggunakan Indeks KAMI

2.3 Isu- Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Berdasarkan hasil analisis permasalahan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar dan berdasarkan analisis lingkungan strategis periode sebelumnya, maka dirumuskan isu-isu strategis urusan bidang komunikasi dan informatika, urusan bidang statistik, urusan bidang persandian yang harus diselesaikan pada Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 sebagai berikut:

1. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika :

- Belum optimalnya integrasi sistem dan layanan antar-OPD menyebabkan terjadinya silo aplikasi dan pulau-pulau data yang tidak saling terhubung. Hal ini berdampak pada rendahnya pemanfaatan data lintas perangkat daerah untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara optimal.
- Perlunya peningkatan pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kota Blitar serta akses layanan internet untuk masyarakat guna mendukung digitalisasi di kota Blitar;
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat Kota Blitar terhadap keamanan informasi dan etika digital menyebabkan tingginya potensi penyebaran hoaks, disinformasi, dan akses terhadap konten ilegal seperti judi online. Selain itu, belum optimalnya pengawasan dan manajemen konten pada media digital milik pemerintah daerah menjadikan ruang informasi publik rentan terhadap penyalahgunaan dan menurunnya kepercayaan publik.
- Perlunya peningkatan pengembangan penyediaan informasi dan dokumentasi berbasis elektronik;
- Belum optimalnya pengembangan dan pembentukan kelompok informasi masyarakat guna penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat.

2. Urusan Bidang Statistik

Belum optimalnya peningkatan pengembangan layanan satu data melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik;

3. Urusan Bidang Persandian

Perlunya peningkatan pengembangan pelayanan persandian dan keamanan informasi seiring dengan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh PD dengan prediksi PAGU Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA PD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). RKPD Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD 2025-2029 dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan Nasional dan Provinsi yang relevan. Rancangan awal RKPD Kota Blitar tahun 2026 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan PD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Tema dan Prioritas Pembangunan secara Nasional Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan. Tema Prioritas Pembangunan Jawa Timur Jatim Berkah-Amanah Memperkuat penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, berdaya guna dan partisipatif dan Tema Pembangunan Kota Blitar Tahun 2026 adalah *“Penguatan Pondasi Transformasi Bidang Pelayanan Dasar yang Didukung Kualitas SDM dan Infrastruktur yang Berkelanjutan.”* Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam 5 prioritas pembangunan yaitu:

1. Revitalisasi Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
3. Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan
4. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Berdasarkan lima (5) prioritas pembangunan daerah tersebut, Dinas Kominfotik mendukung prioritas pembangunan ke 5, yakni Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang mendukung adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
3. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Blitar Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Kota Blitar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 persen	5.776.268.012,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Perbandingan jumlah fasilitasi layanan kedinasan yang dilaksanakan sesuai standa dengan jumlah fasilitasi layanan kedinasan yang tersedia lalu dikalikan 100%	100 persen	5.776.268.474,02	efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100persen	11.600.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 persen	13.005.000,00	efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.255.000,00	efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	3.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	3.150.000,00	efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	1.650.000,00	Mendukung Pelaksanaan E - Walidata guna menyusun perencanaan 5 tahun ke depan
1.4	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	3.300.000,00	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dimasing " Perangkat Daerah untuk menjaring aspirasi Stakeholder
1.5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	10 Dokumen	5.600.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	10 Dokumen	1.000.000,00	disesuaikan dengan kebutuhan
1.6	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan			Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara	1.650.000,00	Memfasilitasi Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											ng Target Pembangunan Nasional
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100persen	4.618.624.372,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 persen	4.618.624.372,00	disesuaikan dengan kebutuhan
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	4.617.824.372,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	4.617.824.372,00	disesuaikan dengan kebutuhan
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	800.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	800.000,00	disesuaikan dengan kegiatan
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standart	100persen	91.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standart	100 persen	90.817.000,02	efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	18.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	18.360.000,00	efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	73.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	72.457.000,02	efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standart	100persen	164.946.900,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standart	100 persen	160.580.100,00	disesuaikan dengan standart harga
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8.636.600,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8.577.500,00	disesuaikan dengan standart harga
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	10.020.600,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8.530.100,00	disesuaikan dengan standart harga
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	23.306.900,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	22.647.000,00	disesuaikan dengan standart harga
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	28 Paket	28.750.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	28 Paket	27.974.500,00	disesuaikan dengan standart harga
4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.532.800,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.389.000,00	disesuaikan dengan standart harga

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	2.700.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	4.088.000,00	disesuaikan dengan standart harga
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	89.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	86.374.000,00	efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya
4.8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100persen	50.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 persen	51.746.400,00	disesuaikan dengan standart harga
4.9	Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	30.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	30.000.000,00	disesuaikan dengan standart harga
4.10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	20.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	21.746.400,00	disesuaikan dengan standart harga
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100persen	623.829.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 persen	623.829.000,00	efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	375.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	362.695.400,00	efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	248.829.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	261.133.600,00	efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	100persen	216.267.740,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	100 persen	217.666.602,00	efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	77.820.240,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	79.608.802,00	efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya
6.2	Pemeliharaan Mebel	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Unit	10.000.000,00	Pemeliharaan Mebel	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Unit	10.000.000,00	efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya
6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	64.447.500,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	64.057.800,00	efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	64.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	64.000.000,00	efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya
II	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	86 %	2.300.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	86 %	2.449.999.999,98	program atau kegiatan Prioritas:
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	100Persen	2.300.000.000,00	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	100 Persen	2.449.999.999,98	efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya
1.1	Relasi Media	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	13 Laporan	228.400.000,00	Relasi Media	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	13 Laporan	381.377.319,98	program atau kegiatan Prioritas:
1.2	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	5 Komunitas	180.000.000,00	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	5 Komunitas	75.738.800,00	efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3	Pelayanan Informasi Publik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1050 Permohonan	90.000.000,00	Pelayanan Informasi Publik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	700 Permohonan	72.056.700,00	efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya
1.4	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	95 Persentase	18.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	75 Persentase	16.288.000,00	efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya
1.5	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	5 Rekomendasi	510.000.000,00	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	5 Rekomendasi	498.500.800,00	efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya
1.6	Diseminasi Informasi	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	80 Persentase	30.000.000,00	Diseminasi Informasi	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	65 Persentase	16.187.200,00	efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya
1.7	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	6 Media	1.150.000.000,00	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	6 Media	1.295.180.180,00	program atau kegiatan Prioritas:

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	4 Dokumen	18.600.000,00	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	4 Dokumen	16.450.000	efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya
1.9	Penyusunan Konten	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Konten Informasi Publik	640 Konten	25.000.000,00	Penyusunan Konten	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Konten Informasi Publik	540 Konten	31.245.000	efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya
1.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	120 Orang	50.000.000,00	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	80 Orang	46.976.000,00	efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase Pemenuhan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan berbasis digital	87,32 persen	4.535.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase Pemenuhan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan berbasis digital	87,32 persen	4.562.000.000,00	program atau kegiatan Prioritas:
1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Presentase penerapan domain go.id / sub domain pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public sesuai aturan	100persen	63.000.000,00	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Presentase penerapan domain go.id / sub domain pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public sesuai aturan	100 persen	63.000.000,00	efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	2 Dokumen	63.000.000,00	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	2 Dokumen	63.000.000,00	efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya
2	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase Cakupan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Presentase ketersediaan aplikasi pemerintahan dan layanan publik	100persen	4.472.000.000,00	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase Cakupan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Presentase ketersediaan aplikasi pemerintahan dan layanan publik	74,94 persen 84,37 persen	4.499.000.000,00	kegiatan Prioritas
2.1	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	27 Aplikasi	12.000.000,00	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	21 Aplikasi	12.000.000,00	disesuikan dengan standar harga
2.2	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	12.000.000,00	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	2.600.000,00	disesuikan dengan standar harga
2.3	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	151 Perangkat Daerah	432.951.250,00	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	30 Perangkat Daerah	462.951.250,00	kegiatan Prioritas

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.4	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	15 Layanan	5.000.000,00	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	10 Layanan	2.750.000,00	efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya
2.5	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	11.000.000,00	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	1.650.000,00	efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya
2.6	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	4 Aplikasi	156.557.000,00	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	1 Aplikasi	219.574.400,00	Penyesuaian target aplikasi khusus
2.7	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	4 Laporan	13.000.000,00	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1 Laporan	13.000.000,00	efisiensi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	11 Aplikasi	12.000.000,00	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	7 Aplikasi	2.800.000,00	efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya
2.9	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Laporan	15.000.000,00	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Laporan	17.800.000,00	disesuaikan dengan kebutuhan
2.10	Penyediaan Akses Internet	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	151 Perangkat Daerah	3.700.000.000,00	Penyediaan Akses Internet	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	30 Perangkat Daerah	3.660.000.000,00	kegiatan Prioritas
2.11	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	2 Dokumen	90.000.000,00	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	2 Dokumen	98.800.000,00	kegiatan Prioritas
2.12	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	3 Dokumen	9.000.000,00	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	3 Dokumen	15.324.350	kegiatan Prioritas

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1 3	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dokumen	3.491.750,00	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dokumen	2.750.000,00	efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									250.000.000,00	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase PD yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	100 persen	275.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase PD yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	100 persen	250.000.000,00	efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase Data statistik sektoral yang terpublikasi tepat waktu menggunakan sistem elektronik	100persen	275.000.000,00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase Data statistik sektoral yang terpublikasi tepat waktu menggunakan sistem elektronik	100 persen	250.000.000,00	efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya
1.1	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik		92.500.000,00	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	80 %	69.665.500,00	efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya
1.2	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	95 %	48.350.000,00	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	80 %	29.847.500,00	efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.		34.150.000,00	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	80 %	5.750.000,00	efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya
1.4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik		55.900.000,00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	240 Orang	71.003.000,00	menyesuaikan kebutuhan
1.5	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	95 %	25.125.000,00	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	80 %	42.055.000,00	menyesuaikan kebutuhan
1.6	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	2 Laporan	18.975.000,00	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	2 Laporan	31.679.000,00	menyesuaikan kebutuhan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									244.865.200,00	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase Perangkat Daerah yang hasil penilaian implementasi persandian untuk pengamanan informasi masuk kategori baik	70 persen	219.865.662,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase Perangkat Daerah yang hasil penilaian implementasi persandian untuk pengamanan informasi masuk kategori baik	70 persen	244.865.200,00	program atau kegiatan Prioritas
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	80persen	204.665.662,00	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	65 persen	229.670.200,00	program atau kegiatan Prioritas

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3 Laporan	15.600.000,00	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	40.610.600,00	program atau kegiatan Prioritas
1.2	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	3 Laporan	177.236.462,00	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	2 Laporan	177.240.000,00	menyesuaikan kebutuhan
1.3	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	30 Perangkat Daerah	5.200.000,00	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	22 Perangkat Daerah	5.200.000,00	menyesuaikan kebutuhan
1.4	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	3 Dokumen	6.629.200,00	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	2 Dokumen	6.619.600,00	menyesuaikan kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase PD yang menerapkan pola hubungan komunikasi sandi	100laporan	15.200.000,00	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Persentase PD yang menerapkan pola hubungan komunikasi sandi	80 persen	15.195.000,00	menyesuaikan kebutuhan
2.1	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	3 Kegiatan	15.200.000,00	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	2 Kegiatan	15.195.000,00	menyesuaikan kebutuhan
	JUMLAH				13.106.133.674,00					13.306.133.674,00	

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka terdapat perbandingan antara rancangan awal RKPD 2026 dengan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah terdapat beberapa perubahan sebagai berikut: penyesuaian target kinerja, penyesuaian target kebutuhan anggaran pada beberapa sub kegiatan berdasarkan kebutuhan layanan, dan penyesuaian terhadap standart harga.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat *top down* saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara *top down* dan *bottom up*. Sejalan dengan amanat RPJMD Kota Blitar untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Pada tahun 2026 ini tidak terdapat usulan masyarakat untuk kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2026 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD

Tabel. 2.4.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Blitar

No .	Usulan	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	1	2	3	4	5	6
		NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) tahun 2026 akan fokus pada peningkatan produktivitas untuk swasembada pangan dan energi, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif. RKP 2026 juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBN dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta mengintegrasikan RPJPN dan RPJMN.

Prioritas Pembangunan RKP 2026:

1. Kedaulatan Pangan dan Energi: Mencakup optimalisasi Bulog, pelaksanaan food estate, peningkatan bauran energi terbarukan, dan pengelolaan sampah.
2. Ekonomi Produktif dan Inklusif: Fokus pada peningkatan produktivitas industri, pertanian, dan energi, serta peningkatan inovasi teknologi melalui transformasi digital.
3. Pertumbuhan Ekonomi: Target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3% pada tahun 2026
4. Pengentasan Kemiskinan: Akselerasi pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas.
5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter bangsa.
6. Infrastruktur Berkualitas: Peningkatan infrastruktur konektivitas, transisi energi, dan infrastruktur IKN.
7. Peningkatan Kualitas Investasi: Termasuk peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global, serta perbaikan sistem logistik.
8. Pemanfaatan Digitalisasi: Pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung berbagai sektor pembangunan.
9. Ekonomi Hijau: Pembangunan rendah karbon dan transisi energi.

RKP 2026 juga akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan badan usaha dalam menyusun rencana pembangunan.

Target sasaran pembangunan RKP 2026 difokuskan pada penguatan fondasi ekonomi daerah, pemberdayaan masyarakat desa, dan penyediaan akses layanan dasar yang merata. Tema utama RKP 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Beberapa target prioritasnya meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3%, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan percepatan pembangunan wilayah berbasis potensi local

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 bahwa RKPD kabupaten/kota berpedoman pada RKP Tahun 2026, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bitar yaitu melaksanakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah. Dukungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar dalam pencapaian arah kebijakan prioritas pembangunan Nasional adalah “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan”.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2026 dikaitkan dengan sasaran target kinerja

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Tujuan Meningkatnya layanan pemerintahan berbasis digital dan terintegrasi. Dengan indikator tujuan yang disusun adalah Indeks Pemerintahan Digital Indonesia. Target Kinerja dari Indikator Tujuan yang ingin di capai tahun 2026 adalah sebesar 1,70

SASARAN

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah tercapai. Maka sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Layanan Publik Berbasis Digital dan Terintegrasi
2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik
3. Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektorial yang Akurat Dan Dapat Diandalkan
4. Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah.

Table 3.2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Realisasi		Target		Keterangan
						2024	2025	2026	2027	
	Tujuan : Meningkatnya layanan pemerintahan berbasis digital dan terintegrasi	Indeks Pemerintahan Digital Indonesia	Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi) adalah salah satu instrumen pengukuran kematangan transformasi digital pemerintah yang merupakan transisi dari Indeks SPBE. Pengukuran tingkat kematangan Indeks Pemdi meliputi 9 aspek dan 35 indikator sesuai dengan arah kebijakan dan strategi dalam RPJMN 2025-2029.	Perhitungan tingkat kematangan indikator Pemdi yang telah ditetapkan dengan pembobotan oleh Kementerian PANRB pada 9 aspek.	Indeks	-	-	1.7	1.7	IKU
	Sasaran 1 : Meningkatnya Layanan Publik berbasis digital dan terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Layanan publik online adalah layanan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Blitar yang diakses melalui internet Layanan publik online dan terintegrasi adalah pelayanan yang diselenggarakan dengan menggabungkan berbagai jenis layanan dari berbagai perangkat daerah dalam satu sistem yang terhubung	Jumlah jenis layanan online dan terintegrasi / jumlah layanan online dan terintegrasi yang harus tersedia x 100%	%	-	-	28.12	34.37	IKU
	Sasaran 2 : Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik	Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik adalah hasil penilaian atas pemenuhan SAQ (Self Assesment Questionnaire) oleh Komisi Informasi Provinsi Jatim sesuai Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar	Nilai Monev Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Jatim pada tahun berjalan	Nilai	97,86	-	98	98	IKU

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Realisasi		Target		Keterangan
						2024	2025	2026	2027	
			Layanan Informasi Publik atau aturan yang berlaku							
	Sasaran 3 : Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	IPS adalah alat statistik yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja institusi pemerintah (KLDI) dalam penyelenggaraan statistik sektoral.	$k = \frac{\sum \text{bobot domain } k}{x}$ $k = \text{'nilai domain } k \text{'}$ ket : K adalah Banyaknya domain penilaian, Bobot Domain k adalah nilai bobot domain ke-k, Nilai Domain k adalah nilai indeks domain ke-k.	Poin	2,65	-	2.75	2.75	IKU
	Sasaran 4 : Meningkatnya keamanan informasi Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Mengukur tingkat keamanan informasi Pemerintah Kota dilihat dari Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI). Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan pengamanan informasi di suatu organisasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001, yaitu pada Aspek : Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset, Teknologi, Pelindungan Data Pribadi dengan suplemen Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan	Nilai Indeks KAMI hasil verifikasi dibagi Nilai Optimal Indeks KAMI (918) dikali 100%	%	60,24*	-	42,27	51,86	IKU

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Realisasi		Target		Keterangan
						2024	2025	2026	2027	
	Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Perangkat Daerah sesuai PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 atau aturan lain yang berlaku pada aplikasi e-Sukma	IKM = Jumlah NRR IKM Tertimbang x 25 NRR IKM Tertimbang = NRR per unsur x (0,111) NRR per unsur = Jumlah nilai persepsi per unsur dibagi jumlah responden NRR = Nilai rata-rata	Indeks	88.93	89.27	90,80	92,33	IKU

*Tahun 2024 menggunakan Standar Indeks KAMI versi 4.2 Tahun selanjutnya menggunakan Indeks KAMI versi 5.0

Tabel 3.2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Indonesia

Visi		: Kota Blitar Yang Maju, Sehat dan Sejahtera Menuju Kota Masa Depan	
Misi		: Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis <i>Smart Governance</i>	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya layanan pemerintahan berbasis digital dan terintegrasi	Meningkatnya Layanan Publik berbasis digital dan terintegrasi	Meningkatkan implementasi sistem elektronik terintegrasi dan aksesibilitas penyediaan layanan digital	a. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital b. Peningkatan pengelolaan Infrastruktur digital
	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatkan tata kelola informasi dan komunikasi publik serta literasi digital masyarakat untuk mendorong keterbukaan informasi publik	a. Peningkatan tata kelola informasi dan komunikasi publik, Peningkatan tata kelola media komunikasi publik, b. Penguatan kapasitas Sumber daya Komunikasi Publik dan mitra strategis komunikasi c. Peningkatan penanganan pengaduan secara terintegrasi
	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang akurat dan dapat diandalkan	Meningkatkan implementasi satu data Indonesia di daerah dan penyelenggaraan statistik sektoral	a. Peningkatan implementasi Prinsip Satu Data Indonesia, b. Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar, c. Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral untuk mewujudkan Kualitas Statistik Sektoral
	Meningkatnya keamanan informasi Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah	Menguatkan persandian untuk pengamanan informasi dan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah	a. Peningkatan sumber daya keamanan informasi. b. Peningkatan Kebijakan Tata Kelola Persandian Keamanan Informasi c. Peningkatan Layana Keamanan Informasi d. Peningkatan Pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi non elektronik
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan	a. Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah b. Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku c. Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan

Tabel 3.2.3 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2026-2027

No	IKK	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Realisasi		Target	
					2024	2025	2026	2027
	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	-Perangkat daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemkot Blitar yang terdiri dari Badan, Dinas, Bagian, Kecamatan, Kelurahan, dan UPT - Akses internet adalah kemampuan untuk terhubung ke jaringan global yang disebut internet yang difasilitasi oleh Diskominfo	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dibagi Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah dikali 100%	%	100	100	100	100
	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	-Perangkat daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemkot Blitar yang terdiri dari Dinas, Bagian, Kecamatan, Kelurahan, dan UPT - Jaringan intra pemerintah daerah adalah jaringan komunikasi data tertutup pemerintah daerah Kota Blitar yang menghubungkan berbagai perangkat, sistem, dan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Blitar dan tidak termasuk penyediaan jaringan internet yang disediakan oleh Diskominfo	Jumlah Perangkat Daerah tingkat Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dibagi Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah tingkat Kota dikali 100%	%	100	100	100	100
	Persentase Perangkat Dearah yang	- Perangkat daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemkot Blitar	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan SPLPD	%	20	20	23,33	26,67

No	IKK	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Realisasi		Target	
					2024	2025	2026	2027
	Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	yang terdiri dari Badan, Dinas, dan Kecamatan yang berjumlah total 30 perangkat daerah - Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah adalah platform atau infrastruktur TI yang digunakan untuk mengintegrasikan berbagai layanan dan aplikasi di lingkungan Pemda Kota Blitar"	dibagi Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah di kali 100%					
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Ukuran capaian penyelenggaraan statistik sektoral Pemerintah Daerah yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektoral secara keseluruhan. Penilaian terdiri dari 5 domain, 19 aspek dan 38 indikator. Adapun bobot penilaian masing-masing yaitu domain Prinsip Satu Data Indonesia 28%(4 aspek, 4 indikator), domain Kualitas Data 24% (5 aspek, 10 indikator), domain Proses Bisnis Statistik 19% (4 aspek, 7 indikator), domain Kelembagaan (3 aspek, 10 indikator) dan domain	5 Domain: Prinsip Satu Data Indonesia, Kualitas Data, Proses Bisnis Statistik, Kelembagaan, Statistik Nasional. Setiap Domain terdiri dari beberapa aspek dan setiap aspek terdiri dari beberapa indikator.	Poin	2,65	-	2,75	2,75

No	IKK	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Realisasi		Target	
					2024	2025	2026	2027
		5Statistik Nasional 12% (3 aspek, 7 indikator)						
	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	Mengukur tingkat keamanan informasi Pemerintah Kota dilihat dari Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI). Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan pengamanan informasi di suatu organisasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001, yaitu pada Aspek : Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset, Teknologi, Pelindungan Data Pribadi dengan suplemen Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan	Nilai Indeks KAMI hasil verifikasi dibagi Nilai Optimal Indeks KAMI (918) dikali 100%	Angka	60,24*	-	42,27	51,85

*Tahun 2024 menggunakan Standar Indeks KAMI versi 4.2 Tahun selanjutnya menggunakan Indeks KAMI versi 5.0
s

3.3 Program dan Kegiatan

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2026, berdasarkan pertimbangan pada pencapaian program nasional, pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Blitar, peningkatan layanan informasi dan komunikasi publik dan pencapaian peningkatan layanan pemerintahan berbasis digital dan terintegrasi.

Program dan Kegiatan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2026 berdasarkan hasil pemetaan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;. Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang direncanakan sebanyak 5 Program, 13 Kegiatan dan 70 Sub Kegiatan sesuai kebutuhan pagu anggaran sebesar Rp. 13.306.133.674,00 dengan sumber dana Pendapatan Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	Rutin dan Tupoksi
2.16.012.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Rutin dan Tupoksi
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
2.16.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	
2.16.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
2.16.01.2.010.011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	
2.16.01.2.010.013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Rutin dan Tupoksi
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standart	Rutin dan Tupoksi
2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Rutin dan Tupoksi
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
2.16.012.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Rutin dan Tupoksi
2.16.01.2.070.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
2.16.01.2.070..006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
2.16.012.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Rutin dan Tupoksi
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Rutin dan Tupoksi
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	Mendukung Percepatan akselerasi transformasi pemerintah digital di daerah
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Mendukung Percepatan akselerasi transformasi pemerintah digital di daerah
2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Mendukung Percepatan akselerasi transformasi pemerintah digital di daerah
2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Mendukung Percepatan akselerasi transformasi pemerintah digital di daerah
2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pemenuhan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan berbasis digital	Mendukung Percepatan akselerasi transformasi pemerintah digital di daerah
216032.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penerapan domain go.id / sub domain pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public sesuai aturan	
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Presentase ketersediaan aplikasi pemerintahan dan layanan publik	
2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	
2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Mendukung Percepatan akselerasi transformasi pemerintah digital di daerah
2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	
2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	
2.16.03.2.02.0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	
2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Mendukung Percepatan akselerasi transformasi pemerintah digital di daerah
2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Mendukung Percepatan akselerasi transformasi pemerintah digital di daerah
2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Mendukung Percepatan akselerasi transformasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
			pemerintah digital di daerah
2.16.03.2.02.0039	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase PD yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	Mendukung Penguatan kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data statistik sektoral yang terpublikasi tepat waktu menggunakan sistem elektronik	
2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	
2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Mendukung Penguatan kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)
2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Mendukung Penguatan kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)
2.20.02.2.01.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	
2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	
2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang hasil penilaian implementasi persandian untuk pengamanan informasi masuk kategori baik (%)	Mendukung Penguatan keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah Nasional (SSN)
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	
2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	
2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Mendukung Penguatan keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah Nasional (SSN)
2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang menerapkan pola hubungan komunikasi sandi	
2.21.02.2.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,
DAN STATISTIK KOTA BLITAR

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 berisi program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai instrumen untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan.

Rencana tindak lanjut perbaikan LKJIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2024 pada Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2026 tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2024 pada Renja Dinas
Komunikasi, Informatika Tahun 2026

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE dan menyusun dokumen manajemen yang tersedia.	- Program Aplikasi Informatika - Kegiatan Pengelolaan E-gov di lingkup Pemda Kab/Kota - Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
2	Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Mengoptimalkan Tim Asistensi Aplikasi untuk menetapkan target sesuai dengan jenis layanan yang harus dipenuhi	- Program Aplikasi Informatika - Kegiatan Pengelolaan E-gov di lingkup Pemda Kab/Kota - Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah

Pada tahun anggaran tahun 2026, program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar menyesuaikan dengan program/ kegiatan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar 2025 – 2029.

Program yang disusun berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu. Ditetapkan untuk dipedomani, dijabarkan dan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi,

Informatika Dan Statistik Kota Blitar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Total kebutuhan dana / pagu indikatif pada tahun 2026 adalah sebesar Rp. 13.306.133.674,00. Adapun program / kegiatan /sub kegiatan yang dianggarkan pada tahun 2027 diuraikan secara rinci pada Tabel 4.2 tentang Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program, kegiatan, dan sub kegiatan PD Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kota Blitar

Kode Rek.					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1					2		4		5	6		10	11
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				13.306.133.674,00				13.519.817.651,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				13.306.133.674,00				13.519.817.651,00
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				12.811.264.474,00				13.009.917.651,00
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	100 persen	5.776.268.474,02	Pendapatan Bagi Hasil		100 persen	5,776,268,733.00
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	100persen	13.005.000,00	Pendapatan Bagi Hasil		100 persen	13,005,000.00
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	2 Dokumen	2.255.000,00	Pendapatan Bagi Hasil		2Dokumen	2,255,000.00
2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	10 Laporan	3.150.000,00	Pendapatan Bagi Hasil		10 Laporan	3,150,000.00
2	16	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	1 data	1.650.000,00	Pendapatan Bagi Hasil		1 Data	1.650.000,00
2	16	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	1 Berita Acara	3.300.000,00	Pendapatan Bagi Hasil		1 Berita Acara	3.300.000,00

Kode Rek.					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	4		5	6			10	11
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah							
2	1 6	0 1	2.0 1	001 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	10 Dokumen	1.000.000,00	Pendapat an Bagi Hasil		10 Dokumen	1.000.000,00
2	1 6	0 1	2.0 1	001 3	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	1 Berita Acara	1.650.000,00	Pendapat an Bagi Hasil		1 Berita Acara	1.650.000,00
2	1 6	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	100persen	4.618.624.372,0 0	Pendapat an Bagi Hasil & Dana Alokasi Umum (Dau)		100 persen	4,615,009,281.0 0
2	1 6	0 1	2.0 2	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	455 Orang/bulan	4.617.824.372,0 0	Dana Alokasi Umum (Dau)		455Orang/bulan	4.4.614.209.281
2	1 6	0 1	2.0 2	000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	4 Laporan	800.000,00	Pendapat an Bagi Hasil		4 Laporan	800.000,00
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	-	-	Pendapat		100%	1.500.000

Kode Rek.					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	4		5	6			10	11
						daerah Perangkat Daerah sesuai standart				an Bagi Hasil			
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Blitar, Kepanjenkid ul, Sentul	-	-	Pendapat an Bagi Hasil		4	1.500.000
2	1	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standart	Kota Blitar, Kepanjenkid ul, Sentul	100persen	90.817.000,02	Pendapat an Bagi Hasil		100 persen	90.817.000
2	1	0	2.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Blitar, Kepanjenkid ul, Sentul	3 Paket	18.360.000,00	Pendapat an Bagi Hasil		3 Paket	18.360.000
2	1	0	2.0	001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Blitar, Kepanjenkid ul, Sentul	70 Orang	72.457.000,02	Pendapat an Bagi Hasil		70 Orang	72.457.000
2	1	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Kota Blitar, Kepanjenkid ul, Sentul	100persen	160.580.100,00	Pendapat an Bagi Hasil		100 persen	164.695.450
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkid ul, Sentul	4 Paket	8.577.500,00	Pendapat an Bagi Hasil		4 Paket	8.636.600,00
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkid ul, Sentul	3 Paket	8.530.100,00	Pendapat an Bagi Hasil		3 Paket	8.530.100
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkid ul, Sentul	5 Paket	22.647.000,00	Pendapat an Bagi Hasil		5 Paket	20.647.000
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkid ul, Sentul	28 Paket	27.974.500,00	Pendapat		28 Paket	27.974.500

Kode Rek.					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	4		5	6			10	11
										an Bagi Hasil			
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkid ul, Sentul	1 Paket	2.389.000,00	Pendapat an Bagi Hasil		1 Paket	2.389.000
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkid ul, Sentul	24 Dokumen	4.088.000,00	Pendapat an Bagi Hasil		24 Dokumen	4.088.000
2	1	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Kepanjenkid ul, Sentul	24 Laporan	86.374.000,00	Pendapat an Bagi Hasil		24 Laporan	80.374.000
2	1	0	2.0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar, Kepanjenkid ul, Sentul	-	-	Pendapat an Bagi Hasil		1	12,056,250.00
2	1	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Kota Blitar, Kepanjenkid ul, Sentul	100persen	51.746.400,00	Pendapat an Bagi Hasil		100 persen	51.746.400,00
2	1	0	2.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkid ul, Sentul	40 Unit	30.000.000,00	Pendapat an Bagi Hasil		40 Unit	30.000.000,00
2	1	0	2.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkid ul, Sentul	6 Unit	21.746.400,00	Pendapat an Bagi Hasil		6 Unit	21.746.400,00
2	1	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Kota Blitar, Kepanjenkid ul, Sentul	100persen	623.829.000,00	Pendapat an Bagi Hasil		100 persen	621.829.000,00
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkid ul, Sentul	36 Laporan	362.695.400,00	Pendapat an Bagi Hasil		36 Laporan	362.695.400,00

Kode Rek.					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	4		5	6			10	11
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	13 Laporan	261.133.600,00	Pendapatan Bagi Hasil		13 Laporan	259.133.600,00
2	1	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	100persen	217.666.602,00	Pendapatan Bagi Hasil		100 persen	217.666.602,00
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	8 Unit	79.608.802,00	Pendapatan Bagi Hasil		8 Unit	79.608.802,00
2	1	0	2.0	000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	8 Unit	10.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil		8 Unit	10.000.000,00
2	1	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	10 Unit	64.057.800,00	Pendapatan Bagi Hasil		10 Unit	64.057.800,00
2	1	0	2.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	2 Unit	64.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil		2 Unit	64.000.000,00
2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)		86 %	2.449.999.999,9 8	Pendapatan Bagi Hasil		87%	2.430.234.000,0 0
2	1	0	2.0		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Kota Blitar	100Persen	2.449.999.999,9 8	Pendapatan Bagi Hasil		100 Persen	2.430.234.000,0 0
						Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran		69,50 %				70,50 %	

Kode Rek.					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	4		5	6			10	11
						Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah							
2	1 6	0 2	2.0 1	001 4	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Kota Blitar	13 Laporan	381.377.319,98	Pendapat an Bagi Hasil		13 Laporan	381.377.319,98
2	1 6	0 2	2.0 1	001 5	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kota Blitar	5 Komunitas	75.738.800,00	Pendapat an Bagi Hasil		5 Komunitas	75.738.800,00
2	1 6	0 2	2.0 1	001 7	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kota Blitar	700 pemohon	72.056.700,00	Pendapat an Bagi Hasil		750 pemohon	72.056.700,00
2	1 6	0 2	2.0 1	001 8	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Kota Blitar	75 Persentase	16.288.000,00	Pendapat an Bagi Hasil		80 Persentase	16.288.000,00
2	1 6	0 2	2.0 1	001 9	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Kota Blitar	5 Rekomenda si	498.500.800,00	Pendapat an Bagi Hasil		5 Rekomendasi	498.500.800,00
2	1 6	0 2	2.0 1	002 0	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Kota Blitar	65 Persentase	16.187.200,00	Pendapat an Bagi Hasil		67 Persentase	16.187.200,00
2	1 6	0 2	2.0 1	002 1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun	Kota Blitar	6 Media	1.295.180.180,0 0	Pendapat an Bagi Hasil		6 Media	1.275.414.180,0 0

Kode Rek.					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	4		5	6			10	11
						pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis							
2	1	0	2.0	002	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Kota Blitar	4 Dokumen	16.450.000	Pendapat an Bagi Hasil		4 Dokumen	16.450.000
2	1	0	2.0	002	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Kota Blitar	540 Konten	31.245.000	Pendapat an Bagi Hasil		560 Konten	31.245.000
2	1	0	2.0	002	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Kota Blitar	80 Orang	46.976.000,00	Pendapat an Bagi Hasil		80 Orang	46.976.000,00
2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pemenuhan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan berbasis digital	Kota Blitar	87,32 persen	4.585.000.000,0 0			88,41 persen	4.550.000.000,0 0
2	1	0	2.0		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penerapan domain go.id / sub domain pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public sesuai aturan	Kota Blitar	100persen	63.000.000,00	Pendapat an Bagi Hasil		100 persen	60.000.000,00
2	1	0	2.0	000	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Kota Blitar	2 Dokumen	63.000.000,00	Pendapat an Bagi Hasil		2 Dokumen	60.000.000,00
2	1	0	2.0		Pengelolaan E- government di Lingkup	Persentase Cakupan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Blitar	84,3 Persen	4.524.600.000,0 0	Pendapat		87,5 persen 75,81 persen	4.492.000.000,0 0

Kode Rek.					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	4		5	6			10	11
					Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase ketersediaan aplikasi pemerintahan dan layanan publik		74,94 persen		an Bagi Hasil			
2	1 6	0 3	2.0 2	001 3	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Kota Blitar	21 Aplikasi	12.000.000,00	Pendapat an Bagi Hasil		21 Aplikasi	12.500.000,00
2	1 6	0 3	2.0 2	001 9	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kota Blitar	1 Dokumen	2.600.000,00	Pendapat an Bagi Hasil		1 Dokumen	2.000.000,00
2	1 6	0 3	2.0 2	002 4	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Blitar	30 Perangkat Daerah	472.951.250,00	Pendapat an Bagi Hasil		30 Perangkat Daerah	450.000.000,00
2	1 6	0 3	2.0 2	002 5	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Kota Blitar	10 Layanan	2.750.000,00	Pendapat an Bagi Hasil		11 Layanan	2.500.000,00
2	1 6	0 3	2.0 2	002 6	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Kota Blitar	1 Dokumen	1.650.000,00	Pendapat an Bagi Hasil		1 Dokumen	1.500.000,00
2	1 6	0 3	2.0 2	003 2	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah,	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Kota Blitar	1 Aplikasi	219.574.400,00	Pendapat an Bagi Hasil		4 Aplikasi	200.000.000,00

Kode Rek.					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	4		5	6			10	11
					serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE								
2	1	0	2.0	003	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Kota Blitar	1 Laporan	13.000.000,00	Pendapat an Bagi Hasil		1 Laporan	10.000.000,00
2	1	0	2.0	003	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	7 Aplikasi	2.800.000,00	Pendapat an Bagi Hasil		8 Aplikasi	2.000.000,00
2	1	0	2.0	003	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Kota Blitar	1 Laporan	17.800.000,00	Pendapat an Bagi Hasil		1 Laporan	15.800.000,00
2	1	0	2.0	003	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Kota Blitar	30 Perangkat Daerah	3.660.000.000,0 0	Pendapat an Bagi Hasil		30 Perangkat Daerah	3.691.450.000,0 0
2	1	0	2.0	003	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Kota Blitar	2 Dokumen	98.800.000,00	Pendapat an Bagi Hasil		2 Dokumen	90.000.000,00
2	1	0	2.0	003	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Kota Blitar	3 Dokumen	15.324.350	Pendapat an Bagi Hasil		3 Dokumen	10.000.000,00
2	1	0	2.0	003	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan	Kota Blitar	1 Dokumen	2.750.000,00	Pendapat		1 Dokumen	2.250.000,00

Kode Rek.					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	4		5	6			10	11
						Arsitektur SPBE pemerintah daerah				an Bagi Hasil			
2	2	0			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
2	2	0	0		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	Kota Blitar	100 persen	250.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil		100 persen	268.000.000,00
2	2	0	0	2.0	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data statistik sektoral yang terpublikasi tepat waktu menggunakan sistem elektronik	Kota Blitar	100persen	250.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil		100 persen	268.000.000,00
2	2	0	0	2.0	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Kota Blitar	80 %	69.665.500,00	Pendapatan Bagi Hasil		85 %	70.000.000,00
2	2	0	0	2.0	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Kota Blitar	80 %	29.847.500,00	Pendapatan Bagi Hasil		85 %	30.000.000,00
2	2	0	0	2.0	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Kota Blitar	80 %	5.750.000,00	Pendapatan Bagi Hasil		85 %	8.000.000,00
2	2	0	0	2.0	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Kota Blitar	240 Orang	71.003.000,00	Pendapatan Bagi Hasil		260 Orang	83.000.000,00
2	2	0	0	2.0	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Kota Blitar	80 %	42.055.000,00	Pendapatan Bagi Hasil		85 %	45.000.000,00
2	2	0	0	2.0	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Kota Blitar	2 Laporan	31.679.000,00	Pendapatan		2 Laporan	32.000.000,00

Kode Rek.					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	4		5	6			10	11
					Penyelenggaraan Statistik Sektoral					an Bagi Hasil			
2	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
2	2	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang hasil penilaiain implementasi persandian untuk pengamanan informasi masuk kategori baik (%)	Kota Blitar	70 persen	244.865.200,00	Pendapat an Bagi Hasil		73.30 persen	248.000.000,00
2	2	0	2.0		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Kota Blitar	60 persen	229.670.200,00	Pendapat an Bagi Hasil		65 persen	233.400.000,00
2	2	0	2.0	000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Blitar	2 Laporan	40.610.600,00	Pendapat an Bagi Hasil		2 Laporan	41.000.000,00
2	2	0	2.0	000	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Kota Blitar	2 Laporan	177.240.000,00	Pendapat an Bagi Hasil		2 Laporan	180.000.000,00
2	2	0	2.0	000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Kota Blitar	22 Perangkat Daerah	5.200.000,00	Pendapat an Bagi Hasil		24 Perangkat Daerah	5.500.000,00
2	2	0	2.0	000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan	Kota Blitar	2 Dokumen	6.619.600,00	Pendapat an Bagi Hasil		2 Dokumen	6.900.000,00

Kode Rek.					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	4		5	6			10	11
						dalam menjalankan penyelenggaraan persandian							
2	2	0	2.0		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang menerapkan pola hubungan komunikasi sandi	Kota Blitar	80 Persen	15.195.000,00	Pendapat an Bagi Hasil		90 persen	11.400.000,00
2	2	0	2.0	000	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	Kota Blitar	2 Kegiatan	15.195.000,00	Pendapat an Bagi Hasil		2 Kegiatan	11.400.000,00
					JUMLAH				13.306.133.674, 00				13.269.302.733

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik Tahun 2026 sebagai penjabaran Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik Kota Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2026. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2026.

5.1 Catatan penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kota Blitar Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kota Blitar Tahun 2026. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2026 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026

5.3 Rencana Tindak lanjut

Dalam menghadapi tugas perencanaan yang semakin kompleks, pimpin dan jajaran staf Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar memerlukan rencana tindak lanjut untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, koordinasi dengan perangkat daerah harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat sebagai bagian dan proses pelaksanaan pembangunan daerah sehingga diharapkan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan bisa berjalan tepat sasaran , tepat waktu , tepat anggaran dan administrasi serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya . Misi ke-3 Wali Kota Blitar Terpilih periode 2025-2029 yang diemban oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik adalah

“Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis *Smart Governance*”.

Misi ke-5 Wali Kota Blitar dijabarkan menjadi tujuan/sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas adalah “Meningkatnya layanan pemerintahan berbasis digital dan terintegrasi” Dan tujuan akhirnya untuk mewujudkan Kota Blitar sesuai dengan visi “ KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN “.